

BAB V

KESIMPULAN

Konflik Mindanao yang pada mulanya terjadi akibat sentimen masa lalu ketika Islam pertama kali masuk ke Mindanao ini tidak juga menemukan titik terang meskipun telah diadakan tiga kali perundingan perdamaian, di antaranya adalah Tripoli Agreement 1976, Jedah Accord 1987, dan Final Peace Agreement 1996. Ketiga perundingan ini masing-masing memberikan dampak implementasinya sendiri meskipun pada akhirnya belum juga menghasilkan sebuah resolusi konflik yang efektif. Setelah perundingan perdamaian dilaksanakan, masyarakat muslim Mindanao justru mengalami diskriminasi. Negara yang awalnya berpenduduk mayoritas muslim tersebut kini hanya tersisa 5-7 juta jiwa jumlah penduduk yang menganut agama Islam dari 66 juta jiwa penduduk Filipina (Wa'ie dalam Rachmawati, 2012). Selain itu kehidupan kaum muslim Mindanao juga mengalami kondisi yang jauh tertinggal dibanding dengan kehidupan penduduk non-muslim di Filipina lainnya. Berdasarkan data dari Dinamika Konflik, Perjanjian Damai, dan Kesejahteraan karangan Surwandono, daerah minoritas muslim Mindanao menjadi wilayah termiskin di negara Filipina dengan tidak didukung kemajuan pembangunan wilayah setelah perjanjian perdamaian Tripoli Agreement yang terjadi sejak empat dekade lalu.

Masyarakat muslim Mindanao merasa masih dijajah karena setelah perundingan tersebut masyarakat minoritas muslim Mindanao dilarang oleh

pemerintah Filipina untuk memerintah dan mengontrol sumber daya kekayaan Mindanao di wilayahnya sendiri. Tidak heran jika setelahnya masyarakat minoritas muslim Mindanao mulai melakukan perlawanan terhadap pemerintah sehingga mengakibatkan situasi keamanan nasional yang tidak stabil di wilayah Mindanao dengan puncak pemberontakan pada tahun 1970-an. Kondisi diskriminatif ini membuat masyarakat muslim Mindanao menginginkan pemisahan diri (separatism) dari pemerintah Filipina dan ingin mendirikan negara merdeka di Mindanao agar mendapatkan hak mengatur tanah dan wilayah mereka sendiri.

Isu konflik Mindanao tersebut kemudian menarik dunia Internasional sehingga konflik ini menjadi masalah bagi dunia. Berkaitan dengan konflik Mindanao, Muhammadiyah meyakini bahwa konflik ini merupakan konflik seluruh umat Islam karena ukhuwah Islamiyah (solidaritas antar muslim) yang sangat melekat dalam diri Muhammadiyah. Sebagai gerakan da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang telah melebarkan sayapnya di dunia Internasional, Muhammadiyah berprinsip untuk terus berperan dalam kehidupan keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan universal atau dinamika global sesuai visi Muhammadiyah 2025 yang tertuang pada Muktamar Muhammadiyah ke-46 sehingga dengan sungguh-sungguh Muhammadiyah mengambil peran sebagai mediator konflik tersebut dengan ikut bergabung dalam International Contact Group bersama dengan anggota-anggota negara dan non-negara lainnya.

Bergabungnya Muhammadiyah ke dalam ICG tidak terlepas dari ajakan Malaysia yang sebelumnya pada tahun 1998 telah terlebih dulu menjadi

mediator dalam penyelesaian konflik berkepanjangan ini. Keaktifan Muhammadiyah dalam penyelesaian konflik di Pattani, Thailand membuat Malaysia tertarik untuk mengajak Muhammadiyah ikut serta dalam perumusan perdamaian konflik Mindanao.

Sebagai mediator konflik, Muhammadiyah menerapkan beberapa strategi untuk mengurangi konflik yang terjadi. Strategi yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah strategi fasilitasi komunikasi, yaitu dengan memberikan fasilitas perundingan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk duduk di satu meja dan melakukan dialog bersama agar tercipta pertukaran ide dan resolusi konflik yang membantu kedua belah pihak. Dalam kurun waktu 2009-2012, Muhammadiyah telah memfasilitasi empat kali perundingan perdamaian yang memberikan dampak positif terhadap mutual confidence kedua pihak yang berkonflik. Di sisi lain Muhammadiyah pun turut menggunakan strategi prosedural melalui multi-track diplomacy dengan bergabung ke dalam International Contact Group dan melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah dalam pemberian beasiswa terhadap mahasiswa Moro, serta kerjasama dengan pihak di luar negara yaitu British Council dan AUSAid dalam mendukung stabilitas perdamaian di Mindanao.